

# **SINTESA AL-GHAZALI DAN EMILE DURKHEIM DALAM PENDIDIKAN MORAL MASYARAKAT MODERN**

**WIRASANDI**

Dosen FKIP Universitas Gunung Rinjani  
Selong, Lombok Timur

email : sandiwira05@gmail.com

## **ABSTRAK**

Persoalan pendidikan moral memang harus diakui bukanlah persoalan baru. Banyak ahli pendidikan dalam merumuskan konsep-konsep pendidikannya telah mengaitkan dan menjadikan moral sebagai bagian tidak terpisahkan dari sistem pendidikan. Bahkan sering dikatakan bahwa terbentuknya moral yang baik pada subyek didik merupakan tujuan hakiki dari seluruh proses dan aktifitas pendidikan. Masalah moral secara normatif seharusnya sudah implisit dalam setiap program pendidikan, atau dengan kalimat lain meskipun dalam setiap satuan pelajaran telah disisipkan "pendidikan moral", namun konseptualisasi sistem pendidikan moral secara khusus tetap diperlukan guna memberikan arah atau panduan kepada pelaku pendidikan dalam menjalankan sistem pendidikan moral. Al-Ghazali mengurai etika (moral) sebagai sesuatu yang bercorak mistis. Sumber moral adalah wahyu dan Al-Ghazali menolak rasio sebagai prinsip pengarah dalam tindakan etis manusia. Studi ilmiah tentang moralitas menurut Emile Durkheim pada dasarnya mengisyaratkan usaha serius untuk mengkaji fenomena kehidupan moral sebagai fenomena rasional sejalan dengan evolusi peradaban dan pencerahan masyarakat, konsekuensinya sekularisasi pendidikan moral dapat diterima sebagai keniscayaan sebab transformasi sejarah memang menuntut demikian. Durkheim berpendapat bahwa moralitas harus bersifat rasional dan dibentuk berdasarkan pijakan nalar.

**Kata kunci :** Pendidikan moral, Al-Gazali, Emile Durkheim

## **ABSTRACT**

The issue of moral education must be recognized is not a new problem. Many educational experts in formulating educational concepts have linked and made morals an integral part of the education system. In fact it is often said that the formation of good morals in the subject is the ultimate goal of all processes and educational activities. Normative moral issues should be implicit in any educational program, or with any other sentence even in every teaching unit inserted "moral education", but the conceptualization of the moral education system in particular is necessary to provide direction or guidance to educators in the moral education system. Al-Ghazali unravels ethics (moral) as something mystical. The moral source is revelation and Al-Ghazali rejects the ratio as the guiding principle in human ethical action. The scientific study of morality according to Emile Durkheim basically suggests a serious attempt to study the phenomenon of moral life as a rational phenomenon in line with the evolution of civilization and the enlightenment of society, consequently the secularization of moral education is acceptable as a necessity because historical transformation does so. Durkheim argues that morality must be rational and formed on the basis of reason.

**Keywords:** Moral education, Al-Gazali, Emile Durkheim

## MORAL DALAM KANCAH MODERNITAS

Masyarakat modern yang ditandai dengan kapitalisme dan rasionalisasi hubungan sosial, dewasa ini menghadapi persoalan yang pelik terkait jatidiri (identitas) sosial. Masyarakat yang atomistik, impersonal dan penuh persaingan dalam dunia pasar dan kapitalisme, membuat orang tidak lagi menemukan jatidiri individualnya dalam jatidiri sosial. Dalam masyarakat tersebut jatidiri seseorang menjadi abstrak dan berdasarkan pilihan bebasnya sendiri. Kesadaran bahwa seseorang menjadi warga komunitas, sehingga berbuat baik terhadap seluruh anggota komunitas secara keseluruhan, telah menipis bahkan cenderung menghilang (Poole, 1993).

Moralitas publik tidak lagi dapat didasarkan atas kesadaran untuk mengejar keutamaan hidup bagi manusia, karena mana yang disebut baik dan mana yang disebut buruk semakin sulit diperoleh kata sepakat. Apa yang secara tradisional dijadikan dasar material, obyektif, dan rasional untuk hidup bermoral, yakni kodrat manusia yang secara ontologis terarah pada Yang baik, kini mulai dipertanyakan karena dianggap tidak sesuai dengan tuntutan kebebasan eksistensial manusia. Moralitas dalam masyarakat modern tidak lagi dilihat dan dihayati sebagai wujud pemenuhan diri, tetapi sebagai pemberi batas-batas yang menjamin kebebasan individu dalam hubungan kontraknya dengan individu yang lain (Nashir, 1999 : 8).

Seiring dengan peralihan dari masyarakat tradisional yang relatif homogen, ke masyarakat global yang pluralistik, terjadilah krisis legitimasi yang luar biasa di dalam masyarakat global tersebut. Krisis legitimasi dalam pengertian bahwa tatanan legitimasi masyarakat tradisional sebuah tatanan masyarakat yang didasarkan pada sebuah sistem kepercayaan atau agama mulai kehilangan validitasnya. Hal-hal diatas pada gilirannya akan memunculkan tendensi perlawanan jika sebuah masyarakat coba diatur dengan dan oleh aturan masyarakat lain. Akan lebih kacau lagi jika setiap kelompok masyarakat memaksakan sistem kepercayaannya sebagai yang "paling benar" untuk mengatur masyarakat dunia.

Oleh karena itu, diperlukan sebuah visi besar untuk mengawal perkembangan masyarakat global saat ini dan di masa depan. Seorang teolog besar abad ini, Hans Kung, mengajukan sebuah visi besarnya tentang etika global. Dalam karyanya yang berjudul "*A Global Ethics For Global Politics And Economics*", Hans Kung menyatakan (Kung, 2002 : 162) tak akan ada tatanan baru tanpa sebuah etika dunia yang baru; sebuah etika global. Ia mendefinisikan etika global sebagai sebuah konsensus dasar tentang nilai-nilai pengikat dan sikap dasar yang dikukuhkan oleh semua sistem kepercayaan (agama) meskipun terdapat perbedaan dogmatis ateis. Dalam kehidupan masyarakat global, menurut Hans Kung, konsensus berarti kesepakatan yang memerlukan standar etika fundamental (nilai-nilai universal) yang meskipun terdapat banyak perbedaan wujudnya dalam agama, bentuk-bentuk kehidupan, budaya, politik, namun dapat diposisikan sebagai basis terkecil bagi kehidupan masyarakat yang pluralistik. Sebuah konsensus global dimungkinkan terwujud di atas moralitas dasar pada beberapa tuntutan fundamental (nilai-nilai universal); seperti kebenaran, keadilan, kemanusiaan, dan semacamnya.

Tentu saja, nilai-nilai universal dalam sebuah konsensus global tidak bersifat subjektif (monologal). Artinya, kebenaran dalam sebuah konsensus tidak bisa didasarkan pada klaim kebenaran yang sifatnya subjektif atau kebenaran yang dipikirkan sendiri. Menurut Jurgen Habermas, orang tidak boleh menganggap klaim kebenarannya sebagai kebenaran yang sudah selesai yang mengatasi hubungan-hubungan sosial (Hardiman, 1993 : 65). Jadi, kebenaran dalam sebuah konsensus, seperti yang dikatakan Habermas, bersifat intersubjektif (dialogal). Melalui dialog yang bebas dominasi, jujur dan terbuka, nilai-nilai konsensus sebagai etika global dapat dikukuhkan. Tanpa etika global, cepat atau lambat masyarakat modern terancam konflik-konflik dan kekacauan.

Namun, harus juga disadari bahwa etika global ini bukanlah obat mujarab yang langsung memberikan solusi bagi persoalan dunia. Setidaknya, etika global memberi

tuntutan dan dasar moral bagi individu maupun tatanan global yang lebih baik. Hans Kung juga tidak naif, bahwa tuntutan etika global ini bukan main sulitnya untuk makhluk rasional sekalipun. Tetapi, menurut dia, harus ada tuntutan semacam itu dalam dialog yang riil dalam masyarakat global. Kalau tidak, dialog akan jatuh pada perspektif *ethnocentris*, entah agama, ras, bangsa, dan kelompok-kelompok kepentingan. Jadi, etika global dalam masyarakat global merupakan sesuatu yang niscaya.

### **ANALISIS PERSAMAAN DAN PERBEDAAN PANDANGAN AL-GHAZALI DAN EMILE DURKHEIM TENTANG PENDIDIKAN MORAL**

Baik al-Ghazali maupun Emile Durkheim sangat menekankan urgensi moral dalam kehidupan manusia dan keduanya juga menekankan pentingnya mentransmisikan moral melalui pendidikan. Namun demikian analisis secara mendalam terhadap pandangan al-Ghazali maupun Emile Durkheim tentang pendidikan moral, akan menemukan banyak hal lain yang memiliki titik-titik persamaan dan perbedaan.

#### **1. Konsep Dan Hakekat Pendidikan Moral.**

Pendidikan moral al-Ghazali lebih bertumpu pada sisi kejiwaan anak didik. Ini terlihat dari pandangannya tentang konsep moral. Baginya moral adalah suatu keadaan atau bentuk jiwa yang menjadi sumber timbulnya perbuatan-perbuatan yang mudah tanpa melalui pemikiran dan usaha. Hal ini pada gilirannya akan memunculkan pendidikan moral yang lebih mengembangkan *spirit personality*, dimana pendidikan lebih mengarah pada pembentukan insan purna yang saleh, mempunyai kepribadian yang baik, kesucian jiwa dengan adanya unsur moral *hikmah, syaja'ah, iffah*, dan *'aadalah* dalam dirinya, dalam rangka pendekatan diri kepada Allah.

Berbeda dengan pendidikan moral yang dikembangkan oleh Emile Durkheim yang bersifat sosial. Hal ini terlihat dari pandangan Durkheim tentang moral. Bahwa moral merupakan suatu fakta sosial yang kehadirannya terlepas dari keinginan subyektif. Fakta moral harus dianggap sebagai

fenomena sosial yang terdiri atas aturan-aturan atau kaidah-kaidah dalam bertindak yang bisa dikenali dari ciri khas tertentu seperti munculnya disiplin, keterikatan kepada kelompok dan otonomi.

Dengan demikian pendidikan moral dalam pandangan Durkheim lebih mengarah kepada *spirit society*, dimana pendidikan bukan hanya bertugas mengembangkan seorang individu sesuai kodratnya, atau hanya menyingkapkan segala kemampuan tersembunyi pada individu yang mengganggu penampakkannya. Pendidikan menurut Durkheim merupakan sarana sosial untuk mencapai tujuan sosial sarana dengan mana suatu masyarakat menjamin kelangsungan hidupnya.

Perbedaan hakikat pendidikan moral dari al-Ghazali dan Emile Durkheim tersebut boleh jadi diakibatkan titik pijak awal yang berbeda dan kondisi sosial politik masyarakat pada zaman yang berbeda. al-Ghazali, sebagai seorang sufi dan menekuni filsafat mengorientasikan penelitiannya pada hakekat manusia meliputi hati nurani dan *al-dzauq* yang ada dalam diri manusia, sehingga pendidikan moralnya lebih berbasiskan psikologi, moral manusia berpangkal dari diri dan pendidikan moral merupakan tuntunan mistik pada jiwa untuk selalu berusaha mencari kehidupan akhirat.

Sementara Emile Durkheim berangkat dari seorang sosiolog yang melakukan penyelidikan terhadap persoalan moral yang dihadapi bangsanya. Ia tumbuh di tengah kondisi masyarakat Perancis yang carut-marut akibat kegagalan revolusi Perancis. Kegagalan dalam politik yang dialami Perancis berimbas dalam nilai-nilai moral dalam masyarakat. Masyarakat mengalami *anomie* (keadaan tanpa acuan moral). Nilai-nilai moral untuk membela bangsa dan tujuan sosial semakin pudar. Sehingga memunculkan pandangan Durkheim bahwa pendidikan moral harus memberikan kontribusi positif dalam menata masyarakat dan bangsanya.

#### **2. Tujuan Pendidikan Moral**

Menurut al-Ghazali tujuan dari perbuatan moral adalah kebahagiaan yang identik dengan kebaikan utama dan

kesempurnan diri. Kebahagiaan menurut Al-Ghazali terbagi menjadi dua macam : kebahagiaan ukhrawi dan kebahagiaan duniawi. Menurutnya kebahagiaan ukhrawi adalah kebahagiaan yang utama sedangkan kebahagiaan duniawi hanyalah metamorfosis.

Orientasi dan tujuan pendidikan moral al-Ghazali mengkristal pada upaya terbentuknya insan kamil menuju pendekatan diri kepada Allah, karena pada hakekatnya manusia diciptakan sebagai hamba Allah. Akan tetapi konsep pendidikan moral al-Ghazali pada hakekatnya juga tidak melupakan kehidupan dunia sama sekali. Kehidupan dunia adalah sisi lain dari peran manusia dalam proses pendekatan diri kepada Allah. Pandangan ini berdiri atas prinsip karena manusia juga diciptakan sebagai khalifah Allah yang bertanggung jawab atas lestari dan harmonisnya alam.

Namun demikian dalam ternyata dalam pendidikan moralnya, al-Ghazali tidak mengulas lebih lanjut tentang sisi-sisi pembentukan moral anak didik dalam kaitannya dengan hubungan dengan masyarakat. Ini artinya bahwa pendidikan moral al-Ghazali lebih menitik beratkan pada pembentukan moral individu yang baik secara individual.

Berbeda dengan orientasi pendidikan moral yang diungkapkan oleh Durkheim, yang lebih menitikberatkan pada terbentuknya masyarakat yang harmonis dan terciptanya struktur-struktur sosial yang baik dalam masyarakat, melalui munculnya kesadaran kolektif sehingga tercipta *ekuilibrium* sosial dalam masyarakat. Menurutnya individu yang baik adalah individu yang mematuhi kaidah, dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat serta mampu bertindak demi tujuan sosial dan masyarakat. Hal ini memperlihatkan bahwa dalam pendidikan moral Emile Durkheim, kepribadian anak didik dalam rangka penanaman sifat-sifat baik bagi dirinya dan dalam kaitannya dengan pemenuhan kebutuhan diri kurang begitu tergarap dengan baik.

Dari perbedaan diatas menunjukkan bahwa tujuan pendidikan moral Al-Ghazali lebih komprehensif yakni memuat tugas

manusia baik sebagai hamba Allah maupun *khalifah fil ardh*, menghargai sisi-sisi kemanusiaan dari individu sebagai bagian dari proses individuasi. Adapun tujuan pendidikan moral Emile Durkheim lebih bercorak *humanisme-antroposentris*. Sehingga hasil konklusi yakni pendidikan moral yang diarahkan pada pembentukan pribadi yang mempunyai kesalehan spiritual dalam hubungannya dengan Allah maupun kesalehan sosial dalam hubungannya dengan sesama manusia merupakan sesuatu yang niscaya.

### 3. Sumber Pendidikan Moral

Baik al-Ghazali maupun Emile Durkheim mengakui adanya otoritas moral tertinggi dalam kehidupan manusia. Otoritas moral dipahami sebagai sesuatu yang menyimpan pengaruh kuat dengan memaksakan semua kekuatan moral yang berada diatas individu. Otoritas tersebut memaksa manusia untuk bertindak dan bertingkah laku sesuai dengannya, dan menjadi *guiding principle* dalam kehidupannya.

Namun demikian sumber yang menjadi otoritas moral antara al-Ghazali dan Emile Durkheim sangatlah berbeda. Bagi al-Ghazali tidak ada semacam hukum, tatanan, ataupun struktur dasar yang didalamnya mampu membangun tindakan moral. Satu-satunya basis moral yang valid adalah wahyu. Rasio manusia tidak bisa dianggap sebagai fondasi moral. Moralitas yang dibangun berdasarkan rasio akan sia-sia. Dengan mengatakan hal ini, al-Ghazali mengabaikan aspek penting dalam wacana moral bahwa subyek atau pelaku tindakan moral adalah manusia. Disamping itu al-Ghazali lupa bahwa agama pada dasarnya dibuat demi kesejahteraan manusia, bukan untuk kesejahteraan dan keuntungan Tuhan. Penolakan terhadap fungsi rasio, dengan bersandarkan wahyu dan anugerah Tuhan untuk mengetahui tindakan moral yang sesungguhnya dan menawarkan suatu metode baru melalui bimbingan syaikh secara ketat. Pandangan al-Ghazali yang demikian memunculkan apa yang disebut etika religius.

Sedangkan Emile Durkheim menyebutkan bahwa pemilik otoritas moral adalah masyarakat dengan catatan

masyarakat dipahami sebagai kesadaran kolektif yang baik dan diinginkan oleh individu dalam membentuk otoritas moral, sehingga memanifestasikan dirinya dalam aturan-aturan imperatif bagi individu. Durkheim menunjukkan masyarakat sebagai unsur pengganti agama sebab ia merupakan makhluk moral yang betul-betul berakar dari realitas empiris yang dapat disentuh melalui penginderaan dan rasio, sementara Tuhan tidak dapat dijangkau oleh ilmu pengetahuan. Moralitas yang dibangun Durkheim ini dengan demikian adalah moralitas sekuler dengan menolak agama sebagai sumber otoritas moral. Durkheim menganggap sumber moralitas haruslah fakta sosial yang dapat dikaji dan diamati secara empiris dengan mengedepankan fungsi rasio manusia.

Dengan demikian terdapat perbedaan yang mendasar antara Al-Ghazali dan Emile Durkheim dimana Al-Ghazali membangun moralitasnya berlandaskan wahyu sehingga bercorak etika religius, sementara Durkheim menolak landasan moral dari agama, Sumber pendidikan moralnya adalah masyarakat dengan berlandaskan rasio dan fakta sosial dalam masyarakat sehingga bercorak rasional, ilmiah dan sekuler.

#### 4. Materi Pendidikan Moral

Banyak pakar pendidikan moral, filsuf moral sampai sekarang ini masih berseberangan dalam menyikapi muatan pendidikan moral. Pendidikan moral harus mengajarkan isi (*content*) atukah proses. Sebagian Filsuf, pendidik, dan pakar-pakar pendidikan moral tetap berpegang pada satu pandangan bahwa pendidikan moral haruslah mengajarkan isi moral tertentu atau paling tidak, pelbagai pandangan dasar tentang moral. Tegasnya pendidikan moral harus mampu mentransmisikan ideologi moral. Sementara sebagian filsuf, pendidik dan pakar pendidikan moral yang lain berpendapat berbeda. Mereka lebih menekankan pada proses. melihat keragaman dalam menyikapi hakikat moralitas, sebagai konsekuensi logis dari kehidupan modern, pendidikan moral harus berorientasi kepada upaya mengajarkan proses moralitas. Pendidikan moral harus lebih berorientasi kepada upaya pengembangan

peserta didik dalam mengoperasionalkan proses umum utamanya dalam menyikapi persoalan moral.

Melihat pandangan keduanya seperti dikemukakan diatas, penulis melihat materi pendidikan moral Al-Ghazali lebih bertumpu kepada pandangan bahwa pendidikan moral haruslah mengajarkan isi moral tertentu atau paling tidak, pelbagai pandangan dasar tentang moral. Tegasnya pendidikan moral harus mampu mentransmisikan ideologi moral yang bersumber pada nilai-nilai yang bersumber dari agama. Nilai-nilai tersebut sedapat mungkin menjadi acuan dalam perilaku sehari-hari.

Adapun pandangan pendidikan moral Durkheim tidak merupakan daftar-daftar urutan tentang kebaikan moral yang harus diajarkan kepada peserta didik. namun merupakan kurikulum yang tersembunyi (*hidden curriculum*), yang proses penanaman nilai-nilai moralnya sangat bergantung dari peranan guru dan masyarakat. Materi pendidikan moral lebih bersumber pada norma-norma, kaidah-kaidah yang berlaku dalam masyarakat.

#### 5. Metode Pendidikan Moral

Metode pendidikan moral yang dikemukakan al-Ghazali dan Emile Durkheim dalam penerapan praktis pendidikan memiliki kecenderungan paradigmatis yang sama. Keduanya menekankan pendidikan moral sebagai upaya membentuk pribadi yang bermoral. Keduanya menekankan pada peran sentral guru atau pembimbing moral dengan konsep *teacher centered* yang lebih menekankan pendidik yang otoritatif dalam metode pembelajarannya.

Persamaan kecenderungan al-Ghazali dan Emile Durkheim diatas berimplikasi pada penerapan yang hampir sama dalam metode pembelajaran yang dibangunnya. Karena bersifat *teacher centered* maka metode pendidikan moral mereka lebih menekankan peran sentral guru seperti: metode pembiasaan, metode keteladanan dan disiplin

Namun ada hal yang berbeda dimana sebagai seorang sufi al-Ghazali juga menggunakan metode *tazkiyah an-nafs* yakni dengan penyucian jiwa melalui bimbingan

yang ketat dari Syaikh yang tidak dimiliki oleh Emile Durkheim, sedangkan Durkheim menggunakan metode penerapan hukuman dan penggunaan sekolah dan keterikatan pada kelompok.

#### 6. Posisi dan Syarat Pendidik Moral

Guru (pendidik moral) dalam pandangan al-Ghazali maupun Emile Durkheim memiliki peran sentral sebagai subyek yang cukup menentukan berhasil tidaknya pendidikan moral. Hal ini berkaitan dengan konsep *teacher centered* dalam pendidikan moral mereka. Konsep seperti ini memandang anak didik sebagai obyek yang pasif sehingga pengajaran moral yang berlangsung merupakan transfer dan transmisi dari guru.

Namun begitu terdapat perbedaan yang cukup mendasar antara al-Ghazali dan Emile Durkheim berkaitan dengan *kualifikasi* seorang pendidik moral. Menurut al-Ghazali seorang pendidik moral haruslah mencerminkan sifat-sifat baik dalam dirinya, mampu mengamalkan ilmu dan amal dan juga berfungsi sebagai *waratsatul anbiya'* di bumi. Konsep demikian menganggap bahwa peran dan tugas guru tidak hanya mempersiapkan anak didik bermoral baik dalam kehidupan dunia semata, namun juga mempersiapkannya menghadapi kehidupan akhirat kelak.

Adapun Emile Durkheim dalam pandangannya tentang pendidik moral lebih mendasarkan pada kecakapan dan kewenangan profesional, menjadikan dirinya sebagai simbol idola dan teladan bagi peserta didiknya. Kualifikasi yang ditekankan kepada pendidik tidak mendasarkan pada moral yang baik kepada Tuhan namun hanyalah kepribadian sosial sebagai mata rantai masyarakat dalam mencapai tujuan sosialnya.

#### RELEVANSI PENDIDIKAN MORAL AL-GHAZALI DAN EMILE DURKHEIM DALAM MASYARAKAT MODERN

Agama dalam masyarakat modern saat ini dihadapkan kepada berbagai permasalahan sekaligus tantangan sebagai akibat langsung maupun tidak langsung dari perubahan dalam skala besar (*wide scale of change*) yang melanda hampir seluruh sektor kehidupan

manusia. Diantara masalah atau tantangan tersebut adalah runtuhnya moralitas manusia. Ketidakpedulian terhadap nilai-nilai moral akan mengakibatkan arah dan tujuan perkembangan peradaban manusia menjadi tidak jelas.

Adalah tanggungjawab agama untuk menjaga dan menumbuhkan kesadaran serta komitmen manusia kepada nilai-nilai moral, sehingga dampak negatif dari globalisasi dapat dikendalikan. Agama melalui pendidikan moral dapat membantu anak didik memahami esensi dan arti penting nilai-nilai moral dan mampu mengembangkan segala potensinya mewujudkan nilai-nilai moral itu dalam perilaku nyata.

Urgensi pendidikan moral ini mendapat perhatian yang besar baik oleh al-Ghazali maupun Durkheim yang berpandangan bahwa pendidikan moral merupakan faktor yang sangat penting dalam kehidupan manusia, dan moralitas dapat ditransmisikan kepada manusia melalui pendidikan.

Namun demikian Pendidikan moral yang ada, baik yang dilakukan lembaga-lembaga negara, lembaga-lembaga keagamaan kurang berdaya dalam mengatasi dampak negatif dari globalisasi (*globalization*). Kegagalan-kegagalan pendidikan tersebut antara lain diakibatkan pada lemahnya sisi metodologi, perbedaan orientasi antara kebaikan Individu dan sosial (*moral publik versus moral privat*) maupun landasan epistemologi pendidikan moral.

Dari sisi metodologi, pendidikan moral yang ada selama ini lebih bercorak doktriner sehingga tidak memberi kesempatan dan ruang yang cukup kepada peserta didik untuk mengunyah ajaran-ajaran moral tersebut secara lebih kritis. Di samping itu pendidikan moral selama ini juga cenderung lebih mengandalkan metode yang bersifat *teacher centered* dan sebagai konsekuensinya peserta didik dipandang sebagai obyek pasif, yang senantiasa tunduk. Bahkan dianggap sebagai sosok yang perlu diasah dan dibentuk. Model-model pendidikan semacam ini lebih mengarah kepada proses transfer dan transmisi. Metode ini banyak digagas oleh al-Ghazali dan Emile Durkheim.

Namun demikian bukan berarti bahwa metodologi al-Ghazali dan Emile Durkheim tidak berguna sama sekali. Metode *teacher centered* sebagaimana digagas oleh al-Ghazali dan Emile Durkheim yang menekankan adanya keteladanan oleh guru dalam konteks kekinian memiliki relevansi dan sangat dibutuhkan. Persoalan tiadanya keteladanan juga memiliki andil bagi kegagalan pendidikan moral selama ini. Oleh karena itu pendidikan moral haruslah mengembangkan aspek keteladanan bukan sekedar seruan, ajakan, imbauan, perintah apalagi pemaksaan. Pendidikan moral juga harus berlangsung secara dialogis, kritis bukan dogmatis maupun doktriner.

*Kedua*, Kelemahan pendidikan moral saat ini adalah tidak adanya integrasi orientasi pendidikan moral secara menyeluruh. Fragmentasi Orientasi pendidikan moral ini terlihat dari pendapat al-Ghazali dan Durkheim. Orientasi pendidikan moral al-Ghazali misalnya hanya menekankan pembentukan individu yang baik dengan munculnya kesucian jiwa untuk mendekatkan diri kepada Allah, namun ia terpisah dari realitas sosialnya. Sedang Durkheim berpendapat pendidikan moral berorientasi pada pengabdian manusia pada tujuan sosial dan masyarakat, dan meninggalkan unsur eksistensi individu.

Orientasi pendidikan moral al-Ghazali yang menekankan kesalehan individual memiliki relevansi dimasa modern seperti sekarang ini dimana manusia mengalami krisis identitas diri, kehampaan makna hidup dan sangat membutuhkan tuntunan dalam dirinya. Namun disisi lain kesalehan individual itu membentuk individu yang kurang peduli dengan realitas sosial masyarakat.

Demikian halnya orientasi pendidikan moral Durkheim yang menekankan pada kesadaran kolektif. Ini menjadi penting jika dikaitkan dengan kecenderungan masyarakat modern saat ini yang lebih mengagungkan individualisme dan mengabaikan tujuan dari tatanan sosial masyarakat yang telah ada.

Sebagaimana diketahui, dewasa ini pengagungan terhadap individualisme meninggalkan problem serius dalam

masyarakat, meskipun harus diakui bahwa individualisme membuka kebebasan bagi manusia sehingga kreatifitas dan inovasi dapat tumbuh subur, namun perlu diingat pada saat yang sama individualisme membawa benih-benih kegetiran. *Pertama* manusia dengan sikap individualistiknya cenderung menuntut kebebasan tanpa batas. Atau sepenuhnya akibatnya peraturan-peraturan normatif terabaikan. *Kedua* manusia kurang peduli terhadap kepentingan sosial karena lebih sibuk dengan kepentingannya sendiri. Louis Leahy bahkan menyebutkan aliran pemikiran modern menganggap manusia hanya bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri.

Gejala demikian semakin mengakar seiring berdentumnya gelombang modernisasi. Modernisasi yang pada awalnya dianggap sebagai pembawa kemajuan dan perkembangan manusia membawa efek ikutan yang membahayakan. Akibat paling buruk adalah menyusutnya kebudayaan yang berlangsung dalam kehidupan manusia di berbagai bidang dan tempat. Dengan demikian hampir sebagian orang kehilangan makna dan pegangan hidup

Ditengah-tengah realitas seperti ini tradisi lama disisihkan dan dianggap usang, sementara nilai-nilai baru tidak kunjung memberikan kebaikan. Pada gilirannya hal ini menyebabkan rusaknya tatanan sosial, sehingga kebersamaan yang kohesif pudar bersamaan dengan tercerabutnya nilai-nilai kemanusiaan individu dalam kehidupan bersama. Jati diri individu menjadi abstrak dan hanya berdasar pilihan bebasnya sendiri. Kesadaran bahwa seseorang menjadi warga komunitas dan berbuat baik bagi komunitas secara keseluruhan adalah baik untuk diri telah menipis. Bahkan cenderung menghilang (Poole, 1993 : 14-15). Individualisme dengan sendirinya meletakkan individu diatas kolektifitas, sebaliknya norma-norma tidak memiliki otoritas yng cukup kuat dalam mengukuhkan kesadaran diri. Persis pada titik inilah manusia kembali kehilangan *guiding principle* dalam menentukan arah kehidupan. Inilah kondisi yang disebut Durkheim sebagai *anomie* (keadaan hampa moral). Disisi lain orientasi hanya terhadap pencapaian tujuan

masyarakat semata akan menimbulkan problem serius dalam peneguhan keunikan dan kepribadian individu. Apalagi bila individu tersebut kurang dibekali nilai-nilai agama. Ia akan terombang-ambing ditengah masyarakat. Apa yang dinggap masyarakat baik akan diikutinya dan apa yang dianggap masyarakat buruk akan ditinggalkannya. Padahal dalam masyarakat modern seperti sekarang tidak semua yang baik menurut masyarakat, baik bagi individu. Oleh karena itu hasil sintesis antara orientasi pendidikan al-ghazali dan emile Durkheim dalam wujud integrasi orientasi tujuan mereka menjadi sangat penting dalam masyarakat modern.

*Ketiga* berkaitan dengan landasan epistemologi. Pendidikan moral dengan transfer dogma-dogma sebagai otoritas moral yang sangat meminggirkan akal pikiran dalam mengunyah dan menginternalisasikan aturan-aturan dan tata moral dan menggantikannya dengan bimbingan secara ketat syaikh seperti yang dikemukakan al-Ghazali, akan meminggirkan fungsi kritis dari akal manusia dalam memahami realitas. Adalah sangat naif jika pada era modern seperti sekarang ini peran akal pikiran manusia dipinggirkan. Kegelisahan anak muda era modern mencari spiritualitas baru jangan-jangan disebabkan penyempitan ventilasi ruang gerak akal pikiran untuk merumuskan etika keagamaan mereka sesuai dengan tantangan yang dihadapi. Sekat-sekat budaya, batas-batas wilayah, semakin transparan sehingga akal pikiran tidak mungkin tidak terpengaruh gelombang budaya dan ilmu. Ini tidak relevan dengan semangat rasionalisme yang diusung oleh masyarakat modern. Demikian halnya pendidikan moral Emile Durkheim yang mendewakan akal dan sumber moral adalah sesuatu yang dapat diindera secara empiris seperti apa yang ada dalam masyarakat. Hal ini akan mengakibatkan manusia kehilangan nilai-nilai moral yang lahir dari fithrah dirinya dan diganti dengan munculnya akal instrumentalis yang serba materi. Bagaimanapun harus disadari bahwa manusia tidak hanya dibekali potensi akal semata namun juga perasaan dan hati nurani yang juga sangat berguna dalam

memberikan tuntunan dalam mencari nilai-nilai moral bagi kehidupan.

Melihat dari hal diatas maka landasan pendidikan moral sudah seharusnya memberikan porsi yang seimbang terhadap akal manusia dalam menterjemahkan nilai-nilai yang terkandung dalam agama. Bukan seperti Durkheim yang lebih mengunggulkan rasio dan menolak agama yang berakibat hilangnya nilai-nilai transenden dalam kehidupan, ataupun al-Ghazali yang menekankan peran wahyu secara total dengan meminggirkan rasio. Sehingga etika keagamaan menjadi kaku, rigid dan puritan. Namun haruslah ada keseimbangan dalam keduanya.

Oleh karena itu sudah seharusnya apabila pendidikan moral diletakkan diatas unsur-unsur nilai agama yang paling mendasar yang dipahami secara komprehensif dari tinjauan berbagai *perspektif*, termasuk telaah historis yang merupakan hasil refleksi sosio-kultural kekinian. Dengan pertimbangan yang sarat nilai tersebut pendidikan moral akan selalu terbuka terhadap kritik untuk terus melakukan transformasi.

Diantara komponen- komponen nilai yang secara sistemik mengakar dalam agama dan lebih mencerminkan karakter inklusif dan universal adalah sistem nilai kultural, sitem nilai sosial, sistem nilai psikologis, sistem nilai tingkah laku manusia yang memuat *interelasi* dan *interkomunikasi* dengan sesamanya (Arifin, 1996 : 140-141). Dengan demikian seharusnya dalam pendidikan moral terkandung nilai-nilai *humanitarianisme-transendental* yang bisa dijadikan sandaran *civil ethics* yang mampu menggugah kesadaran intrinsik manusia akan adanya pertanggung jawaban moral dalam menunaikan amanahnya masing-masing sebagai abdi dari sang Khalik. Dan aspek transenden yang merupakan unsur eksistensial yang ada dalam setiap diri manusia sebagai *human being* yang selalu berusaha melewati batas kemanusiaannya atau apa yang disebut transendensi diri menuju kasalehan ritual dan kasalehan sosial (Hariyadi, 1994 : 90).

Pendidikan moral juga harus mempunyai visi etis bagi kehidupan



masyarakat, berusaha mengantisipasi dampak perubahan sosial dari akibat revolusi industri dan merebaknya kapitalisme yang berakibat adanya kesenjangan antara yang publik dan yang privat sehingga memudahkan tanggung jawab publik dari warga karena kuatnya dorongan pemuasan kepentingan pribadi. Sehingga pendidikan moral mampu melahirkan sentimen moral dan sikap saling menyayangi sesama.

Visi etis moralitas mengandung arti bahwa setiap masyarakat mempunyai suatu kearifan moralitas alamiah yang lahir dari persamaan-persamaan hak asasi manusia dan persamaan dalam menunaikan kewajiban-kewajiban moral, yang darinya individu dan masyarakat bersepakat menciptakan kontrak sosial dalam mengabsahkan formasi-formasi sosial yang eksis menjamin kohesi sosial.

Akhirnya terlepas dari segala kelebihan dan kekurangannya pendidikan moral yang dikemukakan oleh Al-Ghazali maupun Durkheim setidaknya memberikan wawasan baru, ide-ide inovatif dan kontribusi masyarakat modern. Bukan untuk menghentikan laju globalisasi dalam masyarakat modern, tetapi untuk menumbuhkan kesadaran dan komitmen manusia kepada nilai-nilai moral, sehingga dampak negatif dari globalisasi dapat dikendalikan.

## KESIMPULAN

Penelitian ini menghasilkan beberapa kesimpulan :

1. Pandangan al-Ghazali tentang pendidikan moral bercorak individual dan religius. Tujuan pendidikan moral dalam pandangan al-Ghazali adalah membentuk manusia yang suci jiwanya dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Sumber pendidikan moral al-Ghazali adalah wahyu dan melalui bimbingan secara ketat dari syaikh sehingga kurang mengoptimalkan fungsi akal. Materi pendidikan moral al-Ghazali meliputi ilmu dan amal. Metode pendidikan al-Ghazali adalah: metode pembiasaan, metode keteladanan dan metode *tazkiyah an-nafs* (penyucian jiwa)

melalui *takhliyah al-nafs* dan *tahliyah al-nafs*. *Takhliyah al-nafs* adalah usaha penyesuaian diri melalui pengosongan diri dari sifat-sifat tercela. Sedangkan *tahliyah al-nafs* merupakan penghiasan diri dengan moral dan sifat terpuji. Mengenai peran dan Syarat pendidik moral al-Ghazali menekankan bahwa pembimbing moral adalah *warastatul anbiya'* dengan konsep *teacher centered*.

2. Pandangan Emile Durkheim tentang pendidikan moral bercorak sosial, rasional dan sekuler. Pendidikan Moral menurut Emile Durkheim adalah sarana sosial untuk mewujudkan tujuan sosial. Sehingga tujuan pendidikan moral adalah terciptanya solidaritas sosial dan *ekuilibrium* sosial dalam masyarakat. Otoritas pembuat moral dalam pandangan Durkheim adalah masyarakat dengan menggantikan peran agama. Materi pendidikan moral Emile Durkheim merupakan kurikulum yang tersembunyi (*hidden curriculum*). Emile Durkheim menekankan metode pendidikan moralnya dengan disiplin, pembiasaan, penggunaan sekolah sebagai keterikatan dalam kelompok dan metode keteladanan. Mengenai peran dan posisi guru, Durkheim menggunakan konsep *teacher centered* dimana peran dan posisi guru sebagai mata rantai dan agen moral dari masyarakat sangatlah penting.
3. Baik al-Ghazali dan Emile Durkheim mengakui adanya otoritas moral yang tertinggi sebagai prinsip pengarah (*guiding principle*) dalam kehidupan manusia. Keduanya juga mengakui bahwa sumber moral adalah partikular. Metodologi pendidikannya mengembangkan konsep *teacher centered* dan menekankan arti penting metode keteladanan dalam membentuk moral yang baik. Perbedaan antara keduanya terletak pada konsep dan hakekat pendidikan moral, al-Ghazali lebih bercorak individualis dan durkheim bercorak sosialis. Hal ini berakibat pada perbedaan tujuan pendidikan moral. Disisi epistemologi yang otoritas moral keduanya pun berbeda, al-Ghazali menekankan kepada wahyu sedangkan Durkheim menekankan pada

masyarakat. Materi pendidikan moral keduanya juga berbeda al-Ghazali menekankan materi yang teraplikasikan dalam program pengajaran, sedangkan Durkheim menggunakan *hidden curriculum*.

4. Urgensi pendidikan moral yang mendapat perhatian besar baik oleh al-Ghazali maupun Durkheim yang berpandangan bahwa pendidikan moral merupakan faktor yang sangat penting dalam kehidupan manusia, pendidikan merupakan sarana dalam mentransformasikannya adalah sangat relevan dengan masyarakat modern yang mengalami krisis kemanusiaan, kehampaan makna hidup maupun disorientasi dalam kehidupannya. Metode keteladanan pun masih dianggap cukup relevan dalam pendidikan moral. Namun demikian konsep pendidikan yang bercorak *teacher centered* dianggap kurang relevan dengan masyarakat modern. Konsep pendidikan semacam ini kurang menghargai potensi dan bakat yang terkandung dalam diri anak didik. Disisi lain Orientasi pendidikan moral Al-Ghazali dengan menekankan pada wilayah individu semata akan akan melahirkan manusia yang lepas dari realitas sosialnya. Sementara orientasi pendidikan moral Emile Durkheim yang hanya menekankan pembentukan masyarakat yang baik akan melahirkan kurangnya penghargaan pada eksistensi manusia. Oleh karena itu, integrasi orientasi pendidikan moral keduanya merupakan amunisi yang cukup ampuh dalam menanggulangi krisis manusia modern, menuju terbentuknya kesalehan individual dan kesalehan sosial.

#### PUSTAKA RUJUKAN

- Hardiman, FB. 1993. *Kritik Ideologi, Pertautan Pengetahuan dan Kepentingan*. Yogyakarta: Kanisius,.
- Arifin, HM. 1996. *Filsafat Pendidikan Islam*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Hariyadi, Mathias. 1994. *Membina Hubungan Antara Pribadi Berdasarkan Prinsip Partisipasi, persekutuan dan cinta menurut Gabriel Marcel*. Yogyakarta: Kanisius.
- Kung, Hans. 2002. *A Global Ethics For Global Politics And Economics*, diterjemahkan Ali Noer Zaman, *Etika Ekonomi-Politik Global*. Yogyakarta: Penerbit Qalam.
- Nashir, Haedar. 1999. *Agama dan Krisis manusia modern cetakan II*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Poole, Ross. 1993. *Moralitas Dan Modernitas; Di Bawah Bayang-Bayang Nihilisme*, terjemahan F.B Hardiman, Yogyakarta: Kanisius.